



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat berserta Pemerintah Kota Binjai membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif serta terukur. Beberapa hal yang menjadi perhatian perumusan Visi dan Misi adalah:

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;
2. Memberikan arah dan strategi yang Specific (fokus), Measurable (terukur), Acceptable (dapat diterima), Realistic (realistis/dapat dicapai) dan Timebound (memiliki kerangka waktu yang jelas)
3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berpera dalam mendefinisikan dan membentuk masa organisasinya;
5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;
6. Mampu menjalin kesinambungan kepemimpinan organisasi

2.1.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kota Binjai Tahun 2011-2015 adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA BINJAI SEBAGAI KOTA IDAMAN YANG DINAMIS, BERDAYA SAING DAN NYAMAN DALAM KEBERSAMAAN”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. IDAMAN artinya Kota Binjai memiliki *trademark/image* sesuai perkembangan kota dengan pembangunan yang berkelanjutan;
2. DINAMIS artinya Kota Binjai mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman;
3. BERDAYA SAING artinya Kota Binjai memiliki daya saing (Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Jasa);



4. NYAMAN artinya Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua stakeholder untuk melaksanakan aktivitas kehidupan (bertempat-tinggal, bekerja, dan beribadah);
5. KEBERSAMAAN artinya Menghidupkan suasana kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dengan semangat “Binjai Kotaku, kotamu dan kota kita semua”.

2.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka tercapainya Visi tersebut diwujudkan sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian.
2. Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya.
3. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama.
6. Meningkatkan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai satu dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang bertakwa kepada TYME, , cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah.
5. Menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam kemajemukan.



Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Misi : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian, dengan sasaran :
 - a. Menciptakan kesempatan berusaha dan bekerja
 - b. Peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur sosial ekonomi
 - c. Revitalisasi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
 - d. Melanjutkan pembangunan dan ketersediaan pusat-pusat perdagangan yang lengkap dan berkualitas
 - e. Penciptaan iklim investasi
 - f. Pengelolaan aset daerah dan BUMD

2. Misi Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya, dengan sasaran:
 - a. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
 - b. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga medis
 - c. Pemerataan tenaga medis
 - d. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
 - e. Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan RSUD
 - f. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidik
 - g. Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini
 - h. Pembangunan dan pengembangan pendidikan
 - i. Terwujudnya pusat-pusat pendidikan non formal untuk masyarakat, perpustakaan dan taman pintar
 - j. Meningkatkan peran lembaga budaya Kota Binjai
 - k. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

3. Misi Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan dan percepatan pembangunan sumber daya air
 - b. Peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan
 - c. Pemantapan sarana dan prasarana transportasi
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

4. Misi Membangun tata kelola pemerintahan yang baik , dengan sasaran:
 - a. Memantapkan penerapan nilai- nilai etika aparatur negara untuk mendukung produktifitas kerja



- b. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar instansi pemerintah di Kota Binjai.
 - c. Menciptakan tata pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel efektif, efisien, menjunjung supremasi hukum, membangun kemitraan dan berdasar visi strategis
 - d. Membuat standard perekrutan dan kinerja PNS dengan dasar pertimbangan keperluan dan kompetensi
 - e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (*e- government*)
5. Misi Membangun dan membina kerukunan hidup beragama, dengan sasaran:
- a. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama berdasarkan proporsi jumlah pemeluk agama
 - b. Membina kerukunan hidup beragama dengan peningkatan pembinaan saling toleransi
 - c. Memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dan pemuka agama
 - d. Program penelitian dan pengembangan agama
6. Meningkatkan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran:
- a. Membangun Image (Citra) Kota Binjai Sebagai “Kota Ramah Anak”
 - b. Melakukan Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
 - c. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Binjai Tahun 2011-2015, maka Pemerintah Kota Binjai akan menempuh 4 (empat) Strategi Pokok Pembangunan Daerah, yaitu:

1. **Strategi Penataan Kedalam** yaitu dengan penataan kembali semangat, jiwa, nilai, dan konsensus antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil (*civil society*);
2. **Strategi Keterpaduan Bidang Strata Pembangunan Daerah** yaitu dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan negara, penentuan skala prioritas tanpa mengabaikan bidang-bidang lain serta pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang ada;
3. **Strategi Peningkatan Sinergi Pembangunan dari tiap Strata Pemerintahan** yaitu dengan keterpaduan langkah dan gerak pembangunan yang sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.



4. **Strategi yang terkait dengan inovasi bidang perkotaan dalam rangka membangun image (citra) Kota Binjai sebagai “Kota Ramah Anak”** yaitu dengan mengembangkan program-program yang mendukung Kota Binjai sebagai Kota Ramah Anak dengan berbaik kebijakan dan infrastruktur pendukung

Strategi pertama ini dimaksudkan untuk mengembangkan semangat kebersamaan antara komponen daerah, yaitu: pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga masyarakat untuk mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada. Masing-masing komponen tersebut akan berperan sesuai dengan kapasitasnya. Komponen Pemerintah Daerah diharapkan akan lebih berperan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi gerakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan fasilitas pendorong (stimulan) kepada masyarakat agar berdayaguna dalam membangun kehidupannya secara mandiri, sementara Komponen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai akan lebih berperan sebagai katalisator aspirasi masyarakat dan motivator pembangunan bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya Komponen Masyarakat seluruhnya diharapkan untuk lebih menjadi subyek dan memberdayakan dirinya sendiri dalam pembangunan untuk mewujudkan derajat kemakmuran dan kesejahteraan. Komponen Dunia Usaha (Perusahaan atau Investor Swasta) diharapkan akan lebih berperan sebagai agen dinamisasi pembangunan melalui investasi dan penyerapan tenaga kerja dengan mendayagunakan potensi sumberdaya yang ada di Kota Binjai, dan Komponen Lembaga Masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, Praktisi) diharapkan dapat berperan aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan dayaguna pembangunan bagi kemandirian masyarakat.

Strategi Kedua dimaksudkan agar penetapan prioritas pengalokasikan anggaran lebih proporsional dengan menerapkan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, agar pengelolaan keuangan dapat terselenggara secara lebih hemat dan efisien dengan tetap mengutamakan kualitas, sehingga sumber dana dan pembiayaan yang tersedia memadai bagi kegiatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, strategi ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.

Strategi ketiga dimaksudkan agar terdapat keterpaduan irama dan gerak langkah pemerintah kota Binjai dengan pemerintah di kawasan sekitarnya, terutama kawasan metropolitan MEBIDANGRO (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), sehingga keterpaduan program antar daerah dapat terwujud dan terjalin kerjasama yang sejalan dan harmonis. Strategi ini harus didukung oleh pengembangan jalan penghubung yang menghubungkan daerah-daerah di MEBIDANGRO, dimana masing-masing daerah memiliki fungsi masing-masing, seperti Pusat kawasan industri, Pusat perdagangan dan jasa, Pusat agrobisnis, Pusat permukiman, pusat simpul pergerakan,



pusat pendidikan, pusat permukiman perkotaan, dan lain-lain. Semangat otonomi daerah, utamanya terkait dengan kewenangan antara provinsi dan kota telah menimbulkan persoalan tarik ulur kewenangan dan kepentingan masing-masing daerah otonom. Untuk itu, sinergi serta keterpaduan gerak dan langkah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kota sangatlah penting demi terciptanya keserasian dan keselarasan dalam pembangunan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Kota Binjai.

Strategi keempat dimaksudkan agar dalam 5 tahun kedepan lahir image (citra) Kota Binjai sebagai "Kota Ramah Anak". Menurut UNICEF (Badan Anak PBB), saat ini kota-kota di Indonesia belum memenuhi kriteria kepedulian dan keberpihakan kepada anak-anak sehingga belum ada satupun masuk daftar "kota layak anak". Kota layak anak (KLA) menurut *UNICEF Innocenti Research Centre* adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota berarti anak-anak memiliki keputusan untuk mempengaruhi kotanya, mengekspresikan pendapat mereka tentang kota, dapat berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial. Kemudian menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, air minum sehat dan akses terhadap sanitasi yang baik, terlindungi dari eksploitasi, kejahatan dan perlakuan salah. Termasuk juga aman berjalan-jalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup bebas polusi, berperan dalam kegiatan budaya dan sosial, dapat mengakses setiap pelayanan tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Binjai dan berdasarkan hasil evaluasi potensi dan sumberdaya yang ada, maka disusunlah agenda pembangunan daerah yang menjadi sentral Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai. Adapun agenda pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Agenda Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Daerah.
Agenda pembangunan yang pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana dan sarana penunjang wilayah yang diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan daya saing daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Agenda Menciptakan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Agenda pembangunan yang kedua dimaksudkan untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik dengan tetap bepegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
3. Agenda Membangun Perekonomian Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan.
Agenda pembangunan perekonomian termasuk pengentasan kemiskinan ini dimaksudkan untuk:



- pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga pendapatan perkapita mengalami peningkatan, dengan tingkat pengangguran yang rendah, dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif pada sektor industri dan sektor jasa yang dibarengi dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan mempunyai daya saing tinggi;
- tingkat dan sebaran dan pemerataan dalam kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Binjai.

4. Agenda Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

2.4 Prioritas Daerah

Untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah Kota Binjai terdapat beberapa sasaran prioritas utama antara lain :

1. Agenda Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Daerah.

Sasaran agenda ini adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan dengan 5 (lima) prioritas utama sebagai berikut :

1. Peningkatan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, yang diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata, kawasan terisolir, dan kawasan ekonomi strategis;
2. Peningkatan dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang diarahkan untuk perluasan pembangunan pada daerah terpencil, tertinggal, serta kawasan permukiman dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan dan percepatan pembangunan sumberdaya air, diarahkan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian serta penyediaan air bersih bagi wilayah permukiman, pengendalian banjir, dan sumber serta kawasan resapan air.
4. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengacu pembangunan yang berkelanjutan.



5. Pemetaan dan pemantauan wilayah rawan bencana, diarahkan pemantauan wilayah rawan bencana yang diakibatkan kondisi topografi dan geografis di daerah Kota Binjai yang memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah serta lahan perkebunan, seperti bencana tanah longsor, dan banjir.
-
2. Agenda Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dan Peningkatan Pelayanan Publik.
Sasarannya adalah menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka upaya terus mengurangi praktek-praktek korupsi pada semua lever jajaran dalam birokrasi sehingga tercipta suatu sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan berwibawa. Sasaran lain yang dalam agenda ini adalah penegakan supremasi hukum tanpa ada diskriminatif terhadap suatu golongan, kelompok ataupun etnis masyarakat dan memulihkan kepercayaan kepada semua lapisan masyarakat terhadap penegakan hukum. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka disusun 4 prioritas utama yaitu:
 1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai "*public servant*" pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta penegakan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan praktek KKN.
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan dan kepatuhan pada hukum yang berlaku.
 3. Penanggulangan kriminalitas dan premanisme serta mendukung kegiatan penghapusan terorisme.
 4. Peningkatan kemampuan penganggulangan keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana.

 3. Agenda Membangun Perekonomian Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan.
Sasarannya adalah mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan terutama pada daerah-daerah tertinggal dan daerah yang Belum memiliki aksesibilitas. Disamping itu, pembangunan pada daerah-daerah tertinggal diharapkan dapat mendorong pada peningkatan daya saing dan produk-produk unggulan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 3 (tiga) prioritas sebagai berikut :
 1. Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, dengan kebijakan diarahkan kepada penguatan struktur dan daya saing industri berbasis domestik-resources baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar ekspor dengan memperhatikan daya serap tenaga kerja serta menumbuhkan sentra-sentra industri sektor pertanian menjadai sektor usaha unggulan daerah



2. Pembangunan Kepariwisata dengan kebijakan diarahkan untuk pengembangan produk-produk wisata dan apresiasi serta peranserta masyarakat dan dunia swasta dalam meningkatkan efektifitas promosi, investasi kepariwisataan dan sinergisitas dalam jasa pelayanan pariwisata.
 3. Peningkatan Investasi dan Pembangunan Usaha Daerah dengan kebijakan diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem satu atap (*one stop service*), terutama bagi UKM, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Disisi lain mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah yang mampu mengelola potensi unggulan daerah secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Agenda Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan
- Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditetapkan dengan 6 prioritas utama
1. Peningkatan kualitas kesehatan dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan jumlah, jaringan, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular khususnya malaria dan ISPA (Inspeksi Saluran Pernafasan Akut), meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat, dan meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini serta meningkatkan penelitian dan pengembangan manajemen kesehatan.
 2. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bantuan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.
 3. Pembangunan kependudukan, keluarga kecil berkualitas, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga dengan kebijakan diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui pengendalian tingkat kelahiran penduduk, meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, memperkuat kelembagaan dan jaringan KB, serta meningkatkan partisipasi pemuda, dan menumbuhkan budaya olahraga dengan mewujudkan keserasian



kebijakan pemuda dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama serta melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang, pornografi, porno aksi, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular seksual di kalangan masyarakat, serta perlu dikembangkan kebijakan manajemen, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

4. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dengan kebijakan diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara, meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah atau kejuruan serta meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini, menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal serta masyarakat penyandang cacat termasuk penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pendidikan khusus, mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru atau tenaga kependidikan khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
5. Pengembangan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kebijakan diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Pembinaan kualitas kehidupan beragama, dengan kebijakan diarahkan untuk memperkuat dan mengartikulasikan identitas bangsa serta menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Program pembangunan prioritas daerah Kota Binjai merupakan upaya yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran pembangunan berdasarkan implementasi atas 6 (enam) misi Kota Binjai antara lain :

- A. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian
Program ini bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur perekonomian Kota Binjai yang berdaya saing dengan wilayah sekitarnya. Sasaran program adalah meningkatnya



lapangan kerja dan berusaha. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Menciptakan Kesempatan Berusaha Dan Bekerja
 - a. Membangun jaringan komunikasi dan informasi antar perusahaan dan pencari kerja
 - b. Memberikan pelatihan wirausaha bagi pemuda calon wirausaha
 - c. Mengaktifkan bursa tenaga kerja

2. Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Infrastruktur Sosial Ekonomi
 - a. Mendorong pengembangan sistem informasi potensi produksi industri penunjang dan industri terkait;
 - b. Mendorong terjalinnya kemitraan industri penunjang dan industri terkait;

3. Revitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - a. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM)
 - b. Memfasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha KUKM;
 - c. Mengembangkan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat
 - d. Mengembangkan peranserta para pelaku dan instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pengembangan KUKM
 - e. Penguatan gerakan koperasi.
 - f. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/cluster melalui layanan Bisnis Development Service (BDS), dan promosi produk sentra.
 - g. Mendorong tumbuhnya kelembagaan koperasi di setiap kelurahan

4. Melanjutkan Pembangunan Dan Ketersediaan Pusat-Pusat Perdagangan Yang Lengkap Dan Berkualitas
 - a. Membangun CBD (Central Business Distrik) yang baru
 - b. Mengembangkan pasar di setiap kecamatan

5. Penciptaan iklim investasi
 - a. Pemutakhiran dan peningkatan kualitas data profil potensi investasi daerah;



- b. Meningkatkan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan;
 - c. Menyelenggarakan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD),
 - d. Peningkatan kualitas SDM/Aparatur Bidang Penanaman Modal dalam pelayanan;
6. Pengelolaan Aset Daerah dan BUMD
- a. Evaluasi penerimaan daerah yang dicapai dan penetapan strategi, pengelolaan sumber pungutan daerah melalui manajemen dan sistem informasi data yang terpadu.
 - b. Optimalisasi sumber pendapatan Daerah terhadap objek pungutan secara objektif.
 - c. Meningkatkan manajemen dan pengawasan kinerja perusahaan daerah.
 - d. Mencari peluang kerjasama operasional dalam rangka revitalisasi Badan Usaha yang tidak sehat.
 - e. Mendorong hubungan kemitraan antara BUMD dan usaha- usaha lainnya berdasarkan kompetensi.
 - f. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD yang benar-benar sehat
- B. Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya
- Program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang sehat, cerdas dan berbudaya.. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Memudahkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih Berkualitas
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dengan penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);
 - b. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media, peningkatan jejaring dan kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan bersumber masyarakat serta gerakan generasi muda;
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui JAMKESMAS dan JAMKESDA



- d. Memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).
2. Peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga medis
 - a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
 - b. Pengadaan beasiswa bagi dokter spesialis
3. Pemerataan tenaga medis
 - a. Terdapatnya kebijakan dan rencana pemerataan tenaga kesehatan
 - b. Peningkatan upaya pemerataan dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan melalui pendayagunaan dan peningkatan daya saing tenaga kesehatan serta memberikan pelayanan kepegawaian yang prima;
4. Meningkatkan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
 - a. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit menular melalui penemuan kasus, imunisasi, surveilans, penatalaksanaan, pengobatan dan pengurangan dampak penyakit, terutama untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. Melakukan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja
5. Meningkatkan Manajemen Dan Mutu Pelayanan RSUD
 - a. Sertifikasi standar manajemen dan mutu pelayanan RSUD dengan standard internasional
 - b. Peningkatan akreditasi RSUD
6. Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kualitas Pendidik
 - a. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik
 - c. Beasiswa melanjutkan pendidikan bagi pendidik
7. Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk rintisan model-model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, memberdayakan masyarakat termasuk lembaga tradisional keagamaan dan organisasi sosial masyarakat;



- b. Peningkatan dukungan operasional pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini;
 - c. Penyediaan data dan informasi yang memadai tentang Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat;
 - d. Pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan demokratisasi.
8. Pembangunan dan Pengembangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Peningkatan Mutu Pendidikan
- a. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata dan bermutu;
 - b. Melakukan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri untuk melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah melalui program CSR (Corporate Social Responsibility);
 - c. Meningkatkan penyediaan buku, alat peraga, perpustakaan dan laboratorium;
 - d. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau
 - e. Penerapan dan menyesuaikan kurikulum yang berbasis kompetensi pada sekolah menengah dan kejuruan;
 - f. Melakukan inisiasi pendirian PTN di Kota Binjai
9. Terwujudnya pusat-pusat pendidikan non formal untuk masyarakat, perpustakaan dan taman pintar
- a. Mengembangkan pusat-pusat pendidikan ketrampilan.
 - b. Mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan kota.
 - c. Mendorong dan mengembangkan taman-taman pintar pada setiap kecamatan.
10. Meningkatkan peran lembaga budaya Kota Binjai
- a. Menggali dan mengembangkan budaya lokal Kota Binjai.
 - b. Pembinaan seni dan budaya
11. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREBANG)



- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tertib dan berbudaya dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
 - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan.
- C. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- Program ini bertujuan untuk mewujudkan meningkatkan pelayanan publik, seperti sumber sumber daya air, jalan-jembatan, sarana transportasi dan pelayanan informasi. Sasaran program adalah terselenggaranya pelayanan publik yang prima. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
- 1. Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Sumber Daya Air
 - a. Penyediaan dan Pengeloaan Air Baku
 - b. Program Pengendalian Banjir
 - c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
 - d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
 - 2. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a. Meningkatkan daya dukung jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan
 - b. Meningkatkan pemeliharaan dan pelayanan jalan dan jembatan
 - c. Meningkatnya partisipasi BUMN, BUMD maupun Swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan
 - d. Pembangunan jembatan untuk membuka daerah yang terisolir
 - 3. Pemantapan sarana dan prasarana Transportasi
 - a. Meningkatnya keterpaduan antar moda transportasi
 - b. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum
 - c. Meningkatnya fasilitas keselamatan lalulintas jalan
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan jalan
 - 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
 - a. Meningkatkan kualitas komunikasi pada semua bidang melalui penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing Kota Binjai
 - b. Membangun jaringan komunikasi dan informasi
 - c. Mendorong pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga pemantau media;



- d. Peningkatan pemerataan informasi melalui pemanfaatan media elektronik, cetak, penyiaran (termasuk penyiaran komunitas) dan media tradisional;
- e. Memfasilitasi Pembangunan internet gratis (Hot Spot Centre) di Kota Binjai

D. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sasaran program adalah terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Memantapkan penerapan nilai-nilai etika aparatur negara untuk mendukung produktivitas kerja
 - a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan ketaatan hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
 - b. Meningkatkan efektifitas pengawasan intern pemerintah
 - c. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa internal;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas informasi pengawasan;
2. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar instansi pemerintah di Kota Binjai.
 - a. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.
 - b. Menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, dan transparan;
 - c. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
3. Menciptakan tata pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, efisien, menjunjung supremasi hukum, membangun kemitraan dan berdasar visi strategis
 - a. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
 - b. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
4. Membuat standard perekrutan dan kinerja PNS dengan dasar pertimbangan keperluan dan kompetensi



- a. Membuat standard untuk penerimaan PNS
 - b. Membuat kode etik PNS
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (E-Government)
- a. Meningkatkan data informasi di website Kota Binjai
 - b. Melakukan update berkala terhadap informasi elektronik
 - c. Membangun sarana dan prasarana teknologi guna mendukung Binjai sebagai Cyber City
- E. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama
- Program ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Binjai yang memiliki masyarakat yang toleran. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama berdasarkan proporsi jumlah pemeluk agama
 - a. Peningkatan penyuluhan dan bimbingan hidup antar umat beragama;
 - b. Pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama;
 - c. Meningkatkan potensi budaya setempat untuk kerukunan hidup umat beragama;
 2. Membina Kerukunan Hidup Beragama Dengan Peningkatan Pembinaan Saling Toleransi
 - a. Mendorong terciptanya hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;
 - b. Pembinaan jaringan kerja antar umat beragama;
 3. Memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh, pembimbing, dan pemuka agama
 - a. Peningkatan pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, dan bagi pemuka agama;
 - b. Peningkatan pelatihan bagi tokoh pemuda lintas agama;
- F. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
1. Membangun Image (Citra) Kota Binjai Sebagai “Kota Ramah Anak”



- a. Membangun sarana bermain untuk anak berupa taman pintar, sudut baca dan lain-lain
 - b. Membuat sosialisasi/kampanye yang menunjukkan Binjai Sebagai Kota yang Ramah Anak
 - c. Menyusun Indikator dan Profil anak Kota Binjai
2. Melakukan Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
- a. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak ditingkat Kota dan Kecamatan, termasuk Pusat Study Wanita/Gender;
 - b. Mengembangkan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafficking), pornografi dan pornoaksi
 - c. Meningkatkan peran media dalam penanggulangan pornografi, pornoaksi, trafficking, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. Melaksanakan analisis gender;
3. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- a. Melakukan koordinasi kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak;
 - b. Melakukan kerjasama lintas sektor dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan;
 - c. Penyusunan PERDA yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan hak anak;



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**